



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Januari 2025

Halaman: 2

Pemilik Kos Campur Didenda Rp 3 Juta

Satpol PP Kota Jogja
Giatkan Razia, Pastikan NIB

JOGJA - Aktivitas kos campur jadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja. Pada akhir tahun lalu sudah ada dua pemilik kos campur yang diajukan ke pengadilan.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja Ahmad Hidayat mengatakan, pada 2024 lalu telah menyeret dua pelaku usaha kos campur di wilayah Danurejan ke meja hijau. Satu pemilik usaha yang diberikan denda Rp 3 juta untuk pondokan dengan 28 kamar. "Sementara satu pemilik lainnya dibebankan denda Rp 2,5 juta dengan delapan kamar yang terisi," jelasnya Rabu (8/1).

Pria yang akrab disapa Dayat itu mengaku, kerap mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya kos campur. Bahkan tidak jarang aktivitas yang dilakukan oleh penghuni kos campur melewati batas norma susila. Untuk tahun ini satpol PP memberi atensi terhadap pengawasan kos campur. "Kami memastikan Nomor Induk Berusaha (NIB) usaha kos-kosan," ungkapnya.

Di samping itu, dia juga mengimbau agar pemilik usaha kos juga memasang papan nama pada bangunan pondokan. Sehingga memudahkan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Di sisi lain, ungkap Dayat, aktivitas kos campur sejatinya juga melanggar Perda Kota Jogja No 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Bagi masyarakat yang menyelenggarakan usaha kos-kosan campur bakal ditertibkan.

"Upaya ini dilakukan untuk menjaga

Bahkan kami juga temukan ada mahasiswi berdua sama mahasiswa, mengaku kakak adik ternyata KTP-nya beda wilayah."

AHMAD HIDAYAT
Kepala Seksi Penyidikan
Satpol PP Kota Jogja

keterlibatan dan kenyamanan lingkungan, serta mengurangi potensi kerawanan sosial," ujar Dayat.

Dalam proses pengawasan tersebut, petugas Satpol PP Kota Jogja juga melakukan pemeriksaan kepada penghuni kamar kos campur. Hasilnya, para penghuni memang tidak memiliki dokumen pernikahan resmi. "Bahkan kami juga temukan ada mahasiswi berdua sama mahasiswa, mengaku kakak adik ternyata KTP-nya beda wilayah," ungkap Dayat.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat berharap, agar ada partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan pondokan. Sehingga dapat tercipta kolaborasi bersama yang dapat menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman.

Pemkot juga terus berupaya melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemilik pondokan. Itu dilakukan, agar dapat dipastikan bahwa pondokan di Kota Jogja beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Jika pemilik pondokan kooperatif, kami juga akan membersamai mereka sampai mendapatkan izin," terang Octo. (inu/pra/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005